

## THE SMART ASN APPLICATION FOR INTEGRATING PERSONNEL SERVICES AT THE REGIONAL CIVIL SERVICE AGENCY OF SIDOARJO REGENCY

Kristie Ferlita Sandrin<sup>1</sup> Diana Hertati<sup>2</sup>  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294  
kristieferlita02@gmail.com

(Received: 10 Januari 2025 / Accepted: 2 April 2025 / Published Online: 19 Juni 2025)

### ABSTRACT

*The implementation of information technology in public services, particularly through E-Government, serves as a strategic step to enhance government efficiency, transparency, and accountability. Sidoarjo Regency, as part of the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE), has developed the Smart ASN application to manage personnel data in a more integrated and efficient manner. This study aims to analyze the innovation of the Smart ASN application and its impact on the quality of personnel services in Sidoarjo Regency using Rogers' theory. The research employs a qualitative descriptive approach, collecting data through observation and literature review. Findings reveal that the Smart ASN application has successfully improved efficiency in personnel data management by reducing data redundancy, accelerating updates, and facilitating access for State Civil Apparatus (ASN). Additionally, transparency and accountability have increased, as data can be monitored in real-time. However, challenges include a technological knowledge gap among ASNs and resistance to change. The results of this study indicate that the Smart ASN application has a positive impact on improving the quality of public services in Sidoarjo Regency, although further improvements are needed in training and technology dissemination for State Civil Apparatus (ASN).*

Keywords: *E-Government; Innovation; Personnel Management; Public Services; Smart ASN.*

### ABSTRAK

Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, khususnya melalui E-Government, merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), telah mengembangkan aplikasi Smart ASN untuk mengelola data kepegawaian dengan lebih terintegrasi dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi aplikasi Smart ASN dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan kepegawaian di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori Rogers. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan kajian pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Smart ASN berhasil meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data kepegawaian dalam mengurangi redundansi data, mempercepat pembaruan, dan mempermudah akses bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga meningkat, mengingat data dapat dipantau secara langsung. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kesenjangan pemahaman teknologi di kalangan ASN serta resistensi terhadap perubahan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa aplikasi Smart ASN memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo, meskipun masih perlu adanya peningkatan dalam pelatihan dan sosialisasi teknologi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kata Kunci : *E-Government; Inovasi; Kepegawaian; Pelayanan Publik; Smart ASN.*

## I. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang, inovasi dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. E-Government sebagai penerapan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan, memainkan peran penting dalam mempercepat transformasi layanan publik. Melalui penerapan E-Government, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih responsive dan mudah diakses oleh masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan Pemerintah mengenai implementasi E-Government yang dicanangkan pada tahun 2003 menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi di seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kepegawaian memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data serta pengolahan informasi kepegawaian, sehingga dapat menghasilkan layanan yang lebih cepat, akurat dan terjangkau bagi para Aparatur Sipil Negara [1]. Selain itu, penerapan sistem berbasis teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam setiap proses administrasi kepegawaian, sehingga meminimalkan potensi kesalahan dan penyalahgunaan wewenang.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut, yang pada akhirnya mengharuskan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada [5]. Hal ini juga berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana pemahaman terhadap teknologi informasi menjadi sangat penting, terutama dalam konteks pemberian pelayanan publik yang semakin bergantung pada sistem berbasis digital. Adopsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari ASN menjadi satu keharusan, mengingat Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang menekankan pentingnya implementasi teknologi dalam administrasi pemerintahan [4]. Peraturan ini menuntut para ASN untuk dapat beradaptasi dan memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, termasuk dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan E-Government di Indonesia diatur melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 mengenai Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang bertujuan untuk mempermudah proses pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi telematika, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah serta mendukung tercapainya prinsip-prinsip good governance. Instruksi tersebut juga

menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pemerintah dalam menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki system adminitrasi pemerintahan. Langkah ini semakin dikuatkan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 yang mengatur kebijakan strategi nasional pengembangan E-Government di Indonesia [2]. Penerapan kebijakan ini juga diperkuat di tingkat daerah melalui Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur implementasi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanana publik di tingkat daerah, mempercepat proses administrasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel [9].

Inovasi dalam sektor publik merupakan salah satu solusi paling penting untuk menghadapi berbagai tantangan, sekaligus menjadi terobosan yang esensial dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi publik. Karakteristik sistem sektor publik yang cenderung bersifat kaku dan formal seringkali menjadi hambatan yang dapat membatasi ruang gerak inovasi. Oleh karena itu, setiap inovasi yang diusulkan perlu diuji secara komprehensif, baik dari segi relevansi maupun keberlanjutannya, serta diimplementasikan dengan pendekatan yang strategis dan optimal. Dengan demikian inovasi dapat memberikan dampak nyata yang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan adaptabilitas sektor publik di tengah dinamika perubahan [12].

Data kepegawaian memiliki peranan yang sangat penting dalam manajemen sebuah instansi, baik itu di sektor pemerintahan maupun swasta. Dengan semakin kompleksnya pengelolaan data dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, penggunaan teknologi berserta sistem yang terintegrasi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Implementasi sistem berbasis teknologi tidak hanya mendukung peningkatan kinerja instansi, tetapi juga mempercepat dan mempermudah berbagai proses administratif terkait kepegawaian. Dengan adanya sistem tersebut, pengelolaan data kepegawaian dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien, sehingga mendukung kelancaran operasional instansi serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pegawai maupun masyarakat [14].

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu daerah di Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi digital dengan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian khusus yaitu pengelolaan data kepegawaian

Aparatur Sipil Negara (ASN), yang memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.

*Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai ASN Kab. Sidoarjo*

<b>Jumlah PNS</b>	8.345
<b>Jumlah PPPK</b>	4.587
<b>Jumlah CPNS</b>	5
<b>Total</b>	<b>12.937</b>

Sumber : BKD Kab. Sidoarjo (2024)

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, jumlah total keseluruhan ASN sebanyak 12.937 pegawai, yang terdiri dari 8.345 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4.587 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 5 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Mengingat jumlah data pegawai yang besar dan kompleksitas pengelolaan yang harus dilakukan, pengelolaan data ASN di Kabupaten Sidoarjo menghadapi tantangan yang signifikan dalam memastikan bahwa setiap proses administrasi dapat berjalan dengan efisien, akurat, dan tepat waktu. Tanpa sistem yang terintegrasi dan modern, risiko terjadinya kesalahan data, keterlambatan dalam pelayanan, dan kurangnya transparansi semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan kepegawaian.

Selama ini, Badan Kepegawaian Sidoarjo menggunakan berbagai aplikasi yang terpisah untuk mengelola data dan layanan kepegawaian, seperti E-Kinerja, E-Sipekat, Cuti Online, Sistem Informasi Non PNS (SINOP) dan lain-lain. Banyaknya aplikasi yang berdiri sendiri menyebabkan data menjadi terfragmentasi atau terpecah serta sulit diakses secara terintegrasi. Hal ini berpotensi menurunkan efisiensi layanan dan menimbulkan tumpang tindih dalam pengelolaan data pegawai. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo membuat aplikasi berbasis teknologi informasi, yaitu Smart ASN sebagai sebuah inovasi digital. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan kepegawaian dalam satu platform yang terpadu.

Dengan hadirnya aplikasi Smart ASN, diharapkan data kepegawaian dapat dikelola secara terpusat sehingga mengurangi redundansi data, proses pembaruan data dapat dilakukan secara otomatis dan serentak di semua aplikasi yang terkait, sehingga meningkatkan integritas dan akurasi data, efisiensi pengelolaan data kepegawaian meningkat, mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan

pembaruan data. Selain itu, aplikasi ini juga mempermudah pengawasan, pengendalian, dan pelaporan data kepegawaian secara langsung.

Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana inovasi dalam layanan kepegawaian melalui aplikasi Smart ASN di Kabupaten Sidoarjo. Kajian ini didasarkan pada teori inovasi yang dikemukakan oleh [13] yang mendefinisikan inovasi sebagai ide, objek, konsep, atau praktik yang dianggap baru dan diterima oleh individu atau kelompok untuk diterapkan atau diadopsi. Dalam tulisan ini, keberhasilan inovasi dievaluasi berdasarkan karakteristik inovasi, yaitu: 1) Keunggulan Relatif (Relative Advantage), 2) Kesesuaian (Compatibility), 3) Tingkat Kerumitan (Complexity), 4) Kemungkinan untuk Dicoba (Triability), 5) Kemudahan untuk Diamati (Observability).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis penerapan aplikasi Smart ASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada penggambaran dan analisis mendalam terhadap fenomena yang terjadi. Dalam konteks ini, sifat deskriptif pada penelitian kualitatif berarti bahwa peneliti berusaha untuk menggambarkan secara rinci dan menyeluruh mengenai peristiwa, fenomena, atau kondisi sosial yang menjadi fokus studi (Waruwu, 2023). Peneliti tidak hanya mendokumentasikan kejadian yang ada, tetapi juga menguraikan konteks dan makna di balik kejadian tersebut, serta memahami hubungan yang ada antara elemen-elemen yang terlibat. Dengan pendekatan ini, penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai fenomena sosial yang diteliti, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap individu atau kelompok yang terlibat. Data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi dan kajian pustaka lainnya. Objek penelitian ini adalah aplikasi Smart ASN yang digunakan dalam pengelolaan kepegawaian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang inovasi aplikasi Smart ASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan yang berhasil dalam mencapai tata kelola yang baik adalah pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang memenuhi harapan masyarakat dan menciptakan kepuasan di kalangan masyarakat [7]. Dalam hal ini, Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menciptakan sistem layanan publik yang lebih efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan inovasi seperti aplikasi Smart ASN. Upaya ini menunjukkan dedikasi pemerintah daerah Sidoarjo dalam memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga melampaui harapan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi para Aparatur Sipil Negara.

Menurut [11], inovasi di sektor publik bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan ide-ide baru yang memanfaatkan teknologi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori inovasi yang dikemukakan oleh [13], yang menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah inovasi dapat diukur berdasarkan lima indikator utama diantaranya:

### **1. Keunggulan Relatif (Relative Advantage)**

Relative Advantage atau keuntungan relative merujuk pada sejauh mana sebuah inovasi menawarkan keunggulan dan nilai tambah dibandingkan dengan sistem sebelumnya atau cara-cara manual yang sudah ada. Keunggulan ini dapat berupa efisiensi yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih baik atau manfaat yang lebih relevan bagi pengguna. Setiap inovasi membawa elemen kebaruan yang mendasar, baik dalam bentuk teknologi, pendekatan, atau proses yang menjadi karakteristik khas dan pembeda dari inovasi lain [6].

Dalam penerapan aplikasi Smart ASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo membawa sejumlah manfaat yang signifikan dibandingkan sistem terpisah-pisah yang sebelumnya. Dengan aplikasi ini, efisiensi kerja meningkat karena proses administratif menjadi lebih cepat dan pengelolaan data lebih terstruktur. Transparansi dan akuntabilitas juga mengalami peningkatan, berkat kemampuan aplikasi untuk memantau data secara langsung, dapat mengurangi manipulasi, dan mempercepat pengajuan dokumen bagi para pegawai. Aparatur Sipil Negara juga merasakan manfaat langsung, seperti kemudahan akses informasi, pengurangan kesalahan administratif, serta percepatan pengajuan dan persetujuan dokumen pegawai. Oleh sebab itu, aspek keunggulan relative pada aplikasi Smart ASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah baik, karena aplikasi ini berhasil memberikan manfaat yang besar dan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengelolaan data kepegawaian dibandingkan dengan sistem manual yang terpisah-pisah sebelumnya.

### **2. Kesesuaian (Compatibility)**

Menurut [11], kompatibilitas merujuk pada sejauh mana sebuah inovasi sesuai dengan nilai-nilai-nilai yang dianut, pengalaman masa lalu, serta kebutuhan yang dimiliki oleh penerima inovasi tersebut. Sebuah inovasi yang tidak sejalan dengan norma, budaya, atau keyakinan yang telah diterima oleh masyarakat cenderung menghadapi hambatan dalam proses penerimaan dan adaptasinya.

Aplikasi Smart ASN telah dirancang untuk mendukung kebutuhan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan fitur-fitur yang sesuai dengan alur kerja yang ada, seperti pengelolaan data ASN, pengajuan cuti, dan penilaian kinerja. Selain itu, aplikasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk Peraturan Bupati Sidoarjo dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2021. Integrasi dengan sistem lain di instansi pemerintah menjadi keunggulan tambahan yang memperkuat kesesuaian aplikasi ini dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, aspek kesesuaian aplikasi Smart ASN dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan pemerintah dinilai sangat baik, mengingat aplikasi ini dirancang untuk mendukung alur kerja yang ada dan sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

### **3. Kerumitan (Complexity)**

Kerumitan merujuk pada sejauh mana suatu inovasi dianggap sulit untuk dipahami, digunakan atau dioperasikan oleh penggunanya [8]. Inovasi yang memiliki tingkat kerumitan tinggi biasanya memerlukan pemahaman yang mendalam atau keterampilan khusus. Semakin rumit suatu inovasi, semakin besar kemungkinan terjadinya resistensi atau penundaan dalam penerimaan, karena pengguna mungkin merasa tidak yakin dengan manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan adopsi, inovasi perlu dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif, serta memberikan pelatihan atau dukungan yang memadai agar pengguna dapat menggunakannya dengan mudah.

Aplikasi Smart ASN dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan user-friendly, sehingga memudahkan ASN dalam mengoperasikan fitur-fiturnya. Namun, tantangan tetap ada, seperti kesenjangan pemahaman teknologi, resistensi terhadap perubahan, serta kompleksitas fitur bagi sebagian Aparatur Sipil Negara. Untuk mengatasi hal ini, pelatihan intensif dan pendampingan langsung diberikan, meskipun adaptasi tetap membutuhkan waktu. Kesulitan lain, seperti masalah integrasi data dan kurangnya sosialisasi awal, juga diatasi melalui peningkatan komunikasi dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Terkait dengan aspek kerumitan, meskipun aplikasi Smart ASN dirancang dengan tingkat kerumitan yang rendah dan antarmuka yang user-friendly, tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan kesenjangan literasi digital menunjukkan bahwa aspek ini masih memerlukan perhatian dan peningkatan pelatihan bagi para ASN.

#### **4. Kemungkinan Dicoba (Triability)**

Menurut [3], inovasi hanya akan diterima oleh pengguna jika telah melalui uji coba yang menyeluruh dan terbukti memberikan manfaat yang jelas serta keunggulan dibandingkan dengan metode atau sistem yang sebelumnya digunakan. Proses pembuktian ini penting agar pengguna dapat melihat secara nyata nilai tambah yang ditawarkan oleh inovasi tersebut, baik dari segi efisiensi, kualitas, maupun hasil yang lebih optimal. Hanya setelah inovasi terbukti memberikan perbaikan yang substansial, barulah masyarakat atau organisasi akan bersedia mengadopsinya secara luas.

Aplikasi Smart ASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui tahap uji coba yang dirancang dengan baik sebelum implementasi penuh, untuk memastikan fungsionalitasnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Uji coba ini melibatkan simulasi penggunaan, pelatihan awal, dan pengujian data nyata yang memberikan peluang bagi ASN untuk memahami dan familiar dengan fitur-fitur aplikasi Smart ASN. Sebagian pengguna merasa percaya diri dalam melanjutkan penggunaan setelah uji coba, berkat panduan yang jelas dan perbaikan berdasarkan masukan yang diberikan. Selain itu, fitur uji coba memungkinkan ASN untuk mengeksplorasi layanan sebelum mengandalkan aplikasi sepenuhnya dalam pekerjaan sehari-hari. Tahap ini tidak hanya meningkatkan kesiapan pengguna tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan penerapan aplikasi secara menyeluruh. Aspek kemungkinan dicoba dalam penerapan aplikasi Smart ASN dinilai sangat baik, karena proses uji coba yang melibatkan simulasi, pengujian data nyata dan pelatihan berhasil memberikan rasa percaya diri kepada pengguna serta masukan penting untuk penyempurnaan aplikasi.

#### **5. Kemudahan Diamati (Observability)**

Kemudahan diamati dalam teori Rogers, inovasi yang berhasil akan menunjukkan dampak positif yang jelas dan mudah diamati oleh pengguna, sehingga mempercepat adopsi dan penerimaan terhadap perubahan yang dilakukan [10].

Perubahan positif yang dihasilkan oleh aplikasi Smart ASN terlihat jelas, terutama dalam peningkatan efisiensi kerja dan transparansi. ASN dapat mengelola data, pengajuan, dan proses administratif lainnya secara digital, menggantikan mode manual yang sebelumnya lambat dan kurang efektif. Dengan mekanisme pemantauan kinerja secara real-time, aplikasi ini menunjukkan hasil langsung dalam hal kecepatan pelayanan dan akurasi data. Aparatur Sipil Negara merasa lebih mudah mengamati dampak aplikasi ini, baik dari sisi peningkatan produktivitas maupun kemudahan dalam mengelola data kepegawaian. Aspek kemudahan diamati pada aplikasi Smart ASN sangat terlihat, dengan perubahan positif yang nyata dalam efisiensi, transparansi dan produktivitas, serta adanya mekanisme pemantauan kinerja real-time yang memperjelas manfaat aplikasi bagi para ASN.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan aplikasi Smart ASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengelolaan data kepegawaian. Berdasarkan pembahasan di atas menggunakan teori [13], hasil penelitian mengungkapkan bahwa aplikasi ini sangat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebijakan pemerintah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Meskipun dirancang dengan atarmuka yang user-friendly, tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan kesenjangan literasi digital masih perlu diatasi, dengan meningkatkan pelatihan dan sosialisasi atau pendampingan bagi ASN untuk memastikan adopsi yang lebih luas. Tahap uji coba aplikasi terbukti efektif dalam membangun kepercayaan pengguna dan memberikan masukan yang penting untuk penyempurnaan aplikasi Smart ASN. Perubahan positif yang terlihat dalam hal efisiensi kerja, transparansi, dan produktivitas ASN menunjukkan bahwa aplikasi ini memiliki manfaat yang besar, meskipun pengembangan lebih lanjut dalam fitur-fitur yang lebih mudah diakses, dan komunikasi yang lebih intensif dengan pengguna perlu diperhatikan. Oleh karena itu, disarankan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari penerapan Smart ASN terhadap kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ayesha, F., Ramadhani, F., Nst, A., Sultan, N., & Riau, S. K. (2024). E-Government-Based Personnel Service Innovation Through the Integrated ASN Management Information System (Sigma) at the Riau Province Regional Personnel Agency Office Inovasi Layanan Kepegawaian Berbasis E-Government Melalui Sistem Informasi Terintegrasi Manajemen ASN (Sigma) di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. *Journal of Public Administration and Management*, 1(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13943156>

- [2] Bina, U., Gorontalo, T., Tui, F. P., Ilato, R., & Katili, A. Y. (n.d.). INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA GORONTALO.
- [3] Efendi, H., Pramono, S., & Kmariyah Sri. (2024). Inovasi Pelayanan Tiket Wisata Berbasis Website di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. JURNAL MAHASISWA SOETOMO ADMINISTRASI PUBLIK.
- [4] Ekonanto, F., & Aminudin, A. (2024). IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT (SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK) BASED ON PERATURAN BUPATI KEPAHANG NOMOR 08 TAHUN 2021 IN KEPAHANG REGENCY. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICY AND PUBLIC ADMINISTRATION, 5(1). <https://doi.org/10.31186/IJPPA>
- [5] Ekram, I., Tuanaya, W., & Wance, D. M. (2022). PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK KANTOR MANUNGGAL SATU ATAP PROVINSI MALUKU. Journal of Governance and Social Policy, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v3i2.26209>
- [6] Febrianti, P., & Maulana, A. (2024). URGENSI PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN (SKK) DALAM MENINGKATKAN INOVASI PELAYANAN DI KECAMATAN (Vol. 11, Issue 1).
- [7] Gamaputra, G., Aini Rosalia, N., Kusyeni, R., & Vokasi, P. (2022). Penerapan Standar Pelayanan Publik melalui Aplikasi SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) di Kantor Kelurahan Celep. In Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (Vol. 5, Issue 2).
- [8] Imania, M., Pramudiana, I. D., & Kamariyah, S. (2024). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kantor Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. JURNAL MAHASISWA SOETOMO ADMINISTRASI PUBLIK.
- [9] JDIH BPK. (2024). BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/296257/perbup-kab-sidoarjo-no-25-tahun-2024>
- [10] Lucky, A., Dosen, A., Drs, P., Sujatmiko, M. P. A., Arge Winanta, R., & Si, M. (2024). INOVASI PELAYANAN PERPANJANGAN SIM MELALUI PROGRAM SIMBOOK DI KANTOR SATPAS POLRES KOTA MAGELANG. In Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN) (Vol. 08, Issue 02).
- [11] Prabowo, H., Suwanda, D., & Syafri, W. (2022). Inovasi Pelayanan pada Organisasi Publik.
- [12] Ramadhan, G., Yusmedi, Y., & Machrunnisa. (2024). Inovasi Sektor Publik Dalam Pengelolaan Surat Menyurat Internal Melalui Program E-Office. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2024(5), 388–394. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10526104>
- [13] Rogers, E. M. . (1995). Diffusion of innovations. Free Press.
- [14] Satrio, I., & Harahap, Y. (2022). Rancangan Aplikasi Pengelolaan Data Kepegawaian Berbasis Web pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara. JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATICS ENGINEERING (CoSIE), 01(2).
- [15] Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI.